

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Penerbit: Chandra Pratama, Jakarta, 1996).
- Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer, (Penerbit: Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994).
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier), Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang1), (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Atmasasmita, Romli. Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi. (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009).
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005 ).
- Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Penerbit: Genta Publishing, Yogjakarta, 2010).
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama cet. VI, 2005).
- Chazawi, Adam. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta: Kencana, 2017).

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- H.T. Ahmad Dedek, dkk, Politik Hukum, Bencana Indonesia, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020).
- Harun M.Husen. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2006).
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005).
- J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979).
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1980)
- Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).
- Lemek, Jeremias. Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Galang Press, 2007).
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Cetakan Kesatu ( Mandar Maju : Bandung, 2010 ).
- Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian. (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, (Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2002).

- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-2. (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-3. (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Qomar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law dan Common Law System*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Deepublish, Sleman, 2019).
- Rauta, Umbu, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).
- Reksodipuro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007).
- Riant Nugroho, *Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19*, (Jakarta: Yayasan Rumah reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite, 2020).
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Pene
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Press, 2006).
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Penerbit: Alumni, Bandung, 1981).
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Penerbit: Yayasan Sudarto, Semarang, 1990).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985).

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: UI Pres, 1983).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta

Soemardi, Dedi. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Indihillco, 1997).

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Centakan Ketiga, ( Offset : Yogyakarta, 2012 ).

Utrecht, E. Hukum Pidana I. (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran: 1958).

Waluyo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. (Semarang: PT. Ghalia indonesia, 1997).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Undang-Undang No 2 tahun 2020 tentang Penanganan Covid 19

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan sosial berskala besar

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 69 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 level 2 dan level 1

Surat Edaran Menteri dalam Negeri no 440/7183/SJ tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan virus covid19 varian omicron serta penegakan penggunaan aplikasi peduli lindungi

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 no 26 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

### **C. Jurnal**

Aras Firdaus and Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19", Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 50 Nomor 2 (2020).

Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", Pagaruyung Law Journal, Vol. 1, Nomor 1 (2017).

Fery Setiawan et al., Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis, (Haura Utama, Sukabumi, 2021).

H. Nuriyanto Rachmad Soepadmo, Analisis Penyebab Meningkatnya Tindak Kriminal Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, di dalam Buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin, (Sulawasi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020).

Harirah, Zulfa & Annas Rizaldi. Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol. 7 No. 1. (Banda Aceh: Jurusan FEB UNSYIAH, 2020).

Haryanti, Dewi. Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II No. 2, Mei-Agustus (Semarang: Faculty of Law Unissula, 2015).

J . E. Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.

Jeki Refialdinata, Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Kampus, Babul Ilmi\_Jurnal Multi Science Kesehatan, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020.

Joshua Aditya Setyanugraha, "Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," Jurnal Rechts Vinding Vol. 10, No. 1, 2021.

Muchammad Bayu Tejo Sampurno, dkk, Budaya Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19, (Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7, No. 6, 2020).

Muhyiddin, "New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 240 IV Nomor 2 (2020).

Nurianto Rachmad Soepadmo, Analisis Penyebab Meningkatnya Tindak Kriminal Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indoensia, di dalam Buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020).

Philips Vermonte dan Teguh Yudo Wicaksono, Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia : Temuan Awal, dalam Indonesia dan Covid-19 Pandangan Multi Aspek dan Sektoral, (CSIS Indonesia, Jakarta, Oktober 2020).

Randi, Yusuf. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.

Roeslan Salen, Mencari Asas-Asas Hukum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Pengajar Hukum Pidana PTN Seluruh Indonesia, Subkonsorium Ilmu Hukum, Jakarta, 1971.

Wayan Suardana et al., "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 Nomor 9 (2020).

#### **D. Online/ World Wibe Web**

Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, University Press, Oxford, 2007. detik.com, "Mendudukkan Kembali Hukum Penegakan Protokol Kesehatan," 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5298549/mendudukkan-kembali-hukum-penegakan-protokol-kesehatan>.

Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", Publikasi Sekretariat Presiden RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

Humas Sekretariat Kabinet, "Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 31 Maret 2020, <https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19?page=3> (diakses tanggal 22 April 2022).

Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

”Pelanggar Aturan PSBB Jokowi Bisa Dipidana Setahun Penjara”, CNN Indonesia 1 April 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401095003-20-488988/pelanggar-aturan-psbb-jokowi-bisa-dipidana-setahun-penjara> (diakses 23 Februari 2022).

Quarantine in the Context of COVID-19”, Social Science in Humanitarian Action Platform, <https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/> (diakses 23 Februari 2022).

S. N, Siregar. Polisi Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>. (Diakses tanggal 9 November 2020).

Sucipto, ”Mantan Ketua MK: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dikenakan UU Karantina”, Sidonews.com 18 November 2020. <https://nasional.sidonews.com/read/236034/13/mantan-ketua-mk-pelanggar-psbb-tak-bisa-dikenakan-uu-karantina-1605654676> (diakses pada 23 Februari 2021).

Wahid, Abdul Sunardi & Kurniawati, D. A. (2020). Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 3 No. 2. 150-161. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6737>.